

IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN PP NO. 71 TAHUN 2010 DI PEMKOT SURABAYA

Gita Desipradani & Zeni Rusmawati
gitadesip@gmail.com & u_zeni@yahoo.co.id
Prodi Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti dan gambaran yang lebih nyata mengenai implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kota Surabaya. Merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di Kota Surabaya dengan basis akrual berjalan sesuai PP No. 71 Tahun 2010. Pemkot Surabaya juga merupakan salah satu Pemerintah Kota di Indonesia yang menjadi percontohan penerapan SAP berbasis akrual bagi Pemerintah Kota / Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia.

Kata Kunci : Implementasi, Standar Akuntansi Pemerintah, Pemkot Surabaya

ABSTRACT

This research is expected to provide evidence and a more real picture about the implementation of accrual-based government accounting standards in the city of Surabaya. Is a descriptive research with qualitative approach. The result of the research shows that the application of Government Accounting Standards in Surabaya City runs according to PP. 71 Year 2010. Pemkot Surabaya is also one of the Municipal Government in Indonesia which became the implementation of accrual-based SAP for the City Government / Local Government in Indonesia.

Keywords: Implementation, Government Accounting Standards, Surabaya City Government

PENDAHULUAN

Pengadopsian *New Public Management (NPM)* di Indonesia dalam bidang reformasi keuangan negara terdapat diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Salah satu ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual. Secara sederhana,

akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban. Sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) dan mencatat aset dan kewajiban.

Pada tahun 2015, seluruh pemda di Indonesia telah menerapkan akuntansi

berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan peraturan tersebut, laporan keuangan penda yang semula terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), bertambah 3 laporan yaitu Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Penelitian penerapan akuntansi pemerintah akrual merupakan isu yang menarik. Kewajiban untuk menerapkan akuntansi pada tahun 2015 mengharuskan setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan harus mempersiapkan diri untuk mendorong kesuksesan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual. Penundaan pemerintah pada pelaksanaan akuntansi pemerintah pada kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2015 membuktikan bahwa akuntansi pemerintah berbasis akrual relatif lebih kompleks dibandingkan dengan pencatatan berbasis kas maupun berbasis kas menuju akrual. Pengalaman dari negara-negara yang telah sukses maupun yang mengalami kegagalan perlu dijadikan pelajaran agar penerapan akuntansi berbasis akrual berhasil diterapkan pemerintah Indonesia.

Kompleksitas pada akuntansi pemerintah berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual memerlukan sarana pendukung berupa teknologi informasi yang berbasis sistem. Teknologi informasi ini berupa *hardware* dan *software*, *database*, dan jaringan. Dibutuhkan teknologi informasi yang memadai dalam pelaksanaan akuntansi

pemerintah berbasis akrual. Menurut Nasution (2008:49), salah satu keberhasilan dari penerapan akuntansi dapat dilihat dari opini wajar tanpa pengecualian (WTP), komponen yang harus diperhatikan untuk memperoleh opini WTP adalah sistem aplikasi teknologi komputer (*IT related*) dalam hasil pemeriksaan. Hasil dari penelitian Romilia (2011) menunjukkan bahwa perangkat pendukung berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintah. Hasil berbeda diperoleh oleh Adventana (2013), bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi berbasis akrual menurut PP no. 71 Tahun 2010.

Keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut, mulai dari faktor sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, latar belakang pendidikan pimpinan, faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi dan dukungan konsultan, maupun faktor situasional lainnya seperti pengalaman satuan kerja dalam menjalankan basis kas menuju akrual dan ukuran satuan kerja tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti dan gambaran yang lebih nyata mengenai sistem akuntansi akrual pada pemerintahan daerah di Indonesia.

New Public Management Theory (Teori NPM)

Konsep *New Public Management* (NPM) adalah paradigma baru dalam manajemen publik yang digunakan untuk melukiskan reformasi sektor publik.

Munculnya konsep ini adalah adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang dianggap tidak efisien dan efektif dalam pengelolaan sumber daya. Ketidakpuasan ini dipicu oleh keadaan utang pemerintah yang terus meningkat, pajak tinggi, dan turunnya pertumbuhan ekonomi (Buhr, 2010).

Organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif, efisien, selalu rugi, rendah kualitas, kurang inovasi, serta berbagai kekurangan lainnya (Mahmudi, 2010:34). Gambaran ini sesungguhnya sangat merugikan, mengingat fakta bahwa organisasi sektor publik mengelola uang yang sangat besar dari masyarakat. Buruknya pengelolaan organisasi sektor publik mendorong terjadinya reformasi lembaga publik. NPM berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik (Mardiasmo, 2002:27).

Reformasi di bidang akuntansi merupakan bagian dari konsep NPM. Akuntansi pada sektor publik menjadi alat pengukuran untuk menentukan apakah sektor publik telah mencapai efisiensi. Salah satu reformasi akuntansi di sektor publik adalah perubahan basis akuntansi. Perubahan akuntansi dari basis kas ke basis akrual merupakan salah satu ciri adopsi konsep NPM oleh sektor publik (Mckendrick, 2007). Perubahan basis

akuntansi dari basis kas ke basis akrual oleh banyak pemerintah dipandang sebagai aspek dari desain NPM yang hampir mirip dengan usaha bisnis yang berfokus pada kinerja di sektor publik (Coonnely dan Hyndmen, 2010). Adanya perubahan basis akuntansi pada sektor publik, yaitu perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual diperlukan karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap saat ini tidak lagi memuaskan, terutama karena kekurangannya dalam menyajikan gambaran keuangan yang akurat dan dalam memberikan informasi manajemen yang berguna dan memadai untuk memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja (Cohen, *et.al.*, 2007).

Penggunaan akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu ciri praktik manajemen keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk memberikan informasi biaya (*cost*) pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan didalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar basis kas. Para manajer sektor publik diminta agar bertanggung jawab untuk seluruh biaya yang berhubungan dengan *output / outcome* yang dihasilkannya. Dukungan akuntansi akrual dapat membantu para manajer sektor publik dalam pengambilan keputusan secara efektif dan efisien (*Organisation for Economic Co-operation and Development*, 2002:11).

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik,

baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003) dalam Mardiasmo (2002:67). Akuntansi berbasis akrual dalam wacana akuntansi, secara konseptual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang.

Perubahan basis akuntansi kas menuju akrual menjadi akrual membawa dampak terhadap perubahan pencatatan dan jenis laporan keuangan yang dihasilkan. Seiring dengan penerapan basis akrual untuk pelaporan keuangan, penyusunan anggaran tetap dilakukan menggunakan basis kas. Hal ini berarti proses pelaporan penganggaran akan menghasilkan laporan realisasi anggaran yang tetap menggunakan basis kas, sedangkan untuk pelaporan keuangan lainnya menggunakan basis akrual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata yang disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara atau dokumenter antara peneliti dan informan. Fokus penelitian membahas tentang implementasi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di kota Surabaya. Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintahan Kota (Pemkot) Surabaya di Jl. Jimerto No. 25 – 27 Surabaya Jawa Timur. Data dikumpulkan dengan wawancara dan pengamatan peneliti sebagai orang luar (*outside observation*). Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk di pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2014). Data yang sudah terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik triangulasi dan digambarkan sesuai dengan tujuan penelitian. Tohirin (2012) pemeriksaan dengan cara triangulasi dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan dan akurasi data. Triangulasi sumber digunakan dalam teknik penelitian ini, Triangulasi sumber dilakukan dengan cara : (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara (b) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Pemkot Surabaya

PP 71 Tahun 2010 yang berisi tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Indonesia, telah diadopsi secara penuh oleh Pemkot Surabaya. Hal ini terbukti karena dalam praktiknya, Pemkot Surabaya juga menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) No. 32 Tahun 2014 yang berfungsi sebagai “pendukung” PP No. 71 Tahun 2010. Perwali tersebut secara garis besar merupakan pedoman atau kebijakan bagi Pemerintah Daerah di kota Surabaya tentang penerapan SAP berbasis akrual. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Kebijakan akuntansi pelaporan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan serta berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. Sedangkan Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP. Hal ini terbukti dari wawancara dengan pejabat di lingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintahan Kota (Pemkot) Surabaya, yang mengatakan :

“Berdasarkan Kepmen 29 tahun 2002 Pemkot Surabaya, masih menggunakan cash basis. Kemudian lahir Permendagri 13 tahun 2006 menggunakan cash towards accrual, belum full accrual. Sejak tahun 2015 menggunakan full accrual basis”.

Sedangkan proses dan kendala dalam pembuatan penyajian laporan keuangan, berikut hasil wawancaranya :

“Kalau di Surabaya itu terutama dalam penyajian laporan keuangan, kita selalu sesuai dengan standart keuangan pemerintah. Yang kedua dalam penata usahaan keuangan, kita usahakan ada pengendalian intern yang memadai, yang selama ini di keuangan, kita terapkan di SKPD-SKPD, dan juga inovasi-novasi, teman-teman di Pemkot sekarang membuat ada E-Accounting, E-Budgeting, E-SDM, jadi mempermudah dan supaya pengendalian lebih memadai”.

Dengan adanya softwre yang dibuat oleh Pemkot Surabaya, seperti E-Accounting, E-Budgeting, E-SDM, dll, memudahkan proses implementasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual di Kota Surabaya. Meskipun kendala berupa Sumber Daya Manusia, yang mungkin kurang menguasai teknologi, sehingga Sumber Daya Manusia tsb, harus sering “update” dan mengikuti pelatihan-pelatihan keuangan.

Lingkungan Akuntansi Pemerintah Kota

Lingkungan operasional organisasi pemerintah kota berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah kota yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Ciri Utama Struktur Pemerintah Kota dan Pelayanan yang Diberikan :

- a) Bentuk umum pemerintah kota dan pemisahan kekuasaan.
- b) Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah.
- c) Adanya pengaruh proses politik.
- d) Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah kota.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kota dapat berupa pajak pemerintah pusat maupun pajak daerah meskipun pemungutannya dilakukan oleh pemerintah kota. Mekanisme otonomi memungkinkan adanya bagi hasil atas pemungutan pajak-pajak tersebut. Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah daerah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan dalam bentuk retribusi, sebagian pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib pajak. Berikut petikan wawancaranya :

“Kalau dulu, misalnya pengakuan piutang pajak kita akui akhir tahun, kalau sekarang full accrual sudah kita akui sebagai pendapatan. Jadi basis akrual nya sudah jalan sesuai dengan adanya Perwali No. 10 tahun 2016 (perubahan kedua terkait kebijakan akuntansi) setelah adanya perwali No. 32 tahun 2014”.

Informasi diatas menyatakan bahwa, pengakuan piutang pajak, dapat diakui sebagai pendapatan, tanpa menunggu hingga akhir tahun. Hal ini sesuai dengan konsep akuntansi accrual basis.

2. Ciri keuangan pemerintah kota yang penting bagi pengendalian :

a) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian. Anggaran pemerintah kota merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah kota dan

pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.

b) Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Pemerintah kota menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah kota, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah kota berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah kota, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah kota untuk memeliharanya di masa mendatang.

c) Penyusutan nilai aset tetap sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahann. Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai. (Sumber : Perwali No. 32 Tahun 2014). Terkait pengakuan aset, didukung dengan hasil wawancara: *“Yang paling mendasar terkait pengakuan aset. Dulu, kalau misalnya melakukan renovasi tidak menambah nilai aset. Tetapi perwali yang baru*

mengatur bahwa, renovasi aset bisa menambah nilai aset tergantung besar kecilnya nilai nominal renovasi aset tsb. Jika nilai renovasinya diatas yang ditentukan, maka renovasi aset tersebut akan menambah nilai aset tsb. Misalnya gedung ini dulu perolehannya 10 M, kemudian direnovasi, ternyata nilai renovasinya melebihi dari 10 M, maka akan menambah nilai aset”.

Dari informasi diatas, pengakuan aset oleh Pemkot Surabaya, sudah mulai dilakukan sesuai dengan prinsip acrual basis, melalui batasan nilai nominal yang diatur dalam Perwali No. 32 Tahun 2014.

Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota

Pelaporan keuangan pemerintah kota menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- (1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- (2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah kota serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- (4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah kota mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- (5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah

kota berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

(6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah kota, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah kota menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah kota. (Sumber : Perwali No. 32 Tahun 2014). Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara :

“Memang sekarang istilahnya kita masih bersakit-sakit dahulu ya, terutama teman-teman di SKPD, tetapi ke depannya teman-teman di SKPD ini, akan merasakan manfaatnya, terutama dalam hal pengendalian, seperti persediaan atau aset, mereka harus mengikuti terus, begitu ada transaksi harus dimasukaan sesuai dengan software yang digunakan dan harus detail, tanggal nya, terima dari siapa ? Mungkin kalau dulu, kita tidak terlalu memperhatikan, pada saat belum full acrual, tapi sekarang penyampaian informasi yang detail harus diperhatikan dan harus bagus”.

Dari wawancara di atas, manfaat paling besar, yang dirasakn dalam penerapan penyajian laporan keuangan Pemkot Surabaya yang selalu mendapat opini WTP dari BPK, dan juga penyajian dari tahun ke tahun yang semakin baik, secara internal akan memberikan manfaat

terhadap SKPD-SKPD di lingkungan Pemkot Surabaya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Implementasi SAP berbasis akrual di Indonesia terutama dalam penerapan di Pemerintah Kota, telah berjalan sesuai dengan tujuan diterbitkannya PP No. 71 Tahun 2010.
2. Pemkot Surabaya merupakan salah satu Pemerintah Kota di Indonesia yang menjadi percontohan penerapan SAP berbasis akrual bagi Pemerintah Kota / Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia.
3. Pemkot Surabaya juga selalu menerbitkan secara berkala penyajian Laporan Keuangannya melalui website yang dapat diakses di www.surabaya.go.id

Saran

Diperlukan penelitian lanjutan tentang implementasi penyajian laporan keuangan pemerintah kota/daerah, agar lebih dapat memberikan manfaat mendalam di bidang ilmu akuntansi sektor publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariandja, Marihot Tua Efendi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Haryanto., Sahmuddin, dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Pertama*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusuma, Muhammad Indra Yudha. 2013. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual pada Pemerintah". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP.
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang. 2014. Badan Pemeriksa Keuangan.
- Lelono, Khoirul Maarif Joko. 2014. "Tingkat Pemahaman Akuntansi Berbasis Akrual pada Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga)". Salatiga: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW.
- Mangkunegara, A. P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Meuthia, Retno Fithri Dan Endrawati. 2008. "Pengaruh Faktor Pendidikan, Pelatihan Pengalaman Kerja dan Penguasaan Komputer Pegawai Bagian Akuntansi Terhadap Kualitas Penyajian Informasi Akuntansi (Studi pada Kantor Cabang Bank Nagari)". Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Mulyana, Budi. 2009. "Penggunaan Akuntansi Akrual di Negara-negara Lain: Tren di Negara-Negara Anggota OEACD". Hal. 1-28.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi manajerial Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32
Tahun 2014. *Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Surabaya*

Rasul, Sjahruddin. 2009. "Penerapan Good
Governance di Indonesia dalam
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi".
Dalam *Mimbar Hukum*, Volume 21 No.
3. Hal. 409-628.

Robbins, S. P. 1996. *Perilaku Organisasi
Edisi Kelima (Jilid 2)*. Jakarta:
Prehalindo

Rofi, Ahmad Nur. 2012. "Pengaruh
Disiplin Kerja dan Pengalaman Kerja
Terhadap Prestasi Kerja Karyawan
pada Departemen Produksi PT. Leo
Agung Raya Semarang". Dalam *Jurnal
Ilmu Manajemen dan Akuntansi
Terapan*, Vol. 3 No. 1. Hal. 1-21.